BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

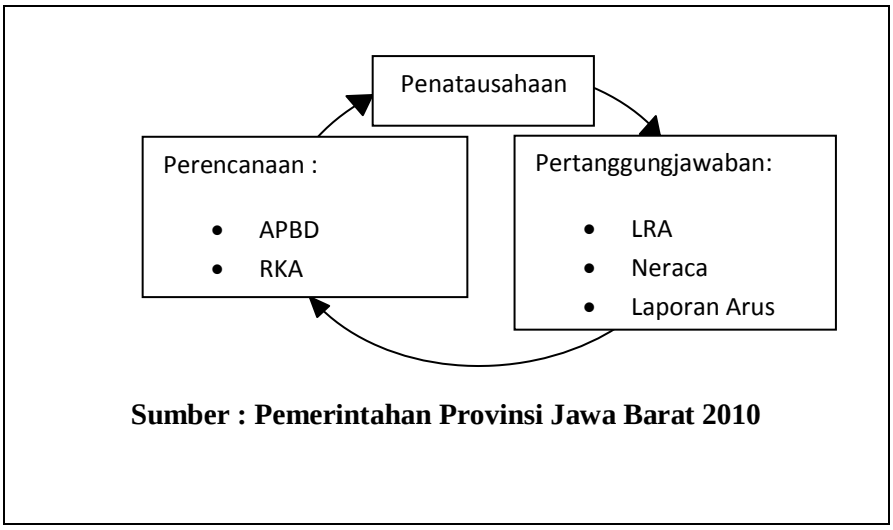
Kemajuan ekonomi dapat ditandai dengan semakin tumbuhnya tiga lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota. Pemerintahan yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Pemerintahan Provinsi Jawa Barat adalah salah satu pemerintahan yang berada dibawah naungan pemerintah pusat. Pemerintahan Provinsi Jawa Barat memiliki tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehubungan dengan itu Pemerintahan Provinsi Jawa Barat berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses penyediaan anggaran kepentingan dan kebutuhan di masyarakat.

Dalam tahapan proses penyediaan anggaran, prosedur penyusunan anggaran pun berpengaruh penting untuk menyelenggarakan suatu kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama, prosedur penting bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam, sedangkan anggaran adalah rencana tertulis mengenai suatu kegiatan.

Laporan keuangan dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. Dana yang dianggarkan dan sudah digunakan untuk suatu kegiatan operasional akan dievaluasi kembali melalui realisasi anggaran. Realisasi anggaran adalah pendapatan yang tersedia yang telah diberikan kewenangannya melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal yang digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tertentu dari realisasi anggaran yang sudah digunakan akan dilaporkan melalui laporan realisasi anggaran. Realisasi anggaran berfungsi sebagai alat kebijakan fiskal, karena melalui anggaran tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan perkiraan ekonomi anggaran dapat digunakan untuk mendorong, menfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk anggaran kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan keuangan secara bersamaan. Dalam penyusunan laporan realisasi anggaran pun tidak terlepas dari prosedur yang sudah ditentukan dalam undang-undang yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat dan bagian penatausahaan dalam Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sendiri. Penatausahaan di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat termasuk kedalam bagian biro keuangan. Penatausahaan adalah tempat pencairan dana anggaran yang akan digunakan

sesuai dengan perencanaan sebelumnya dan setelah rencana kegiatan berjalan laporan realisasi akan dibuatkan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan gambar berikut ini :



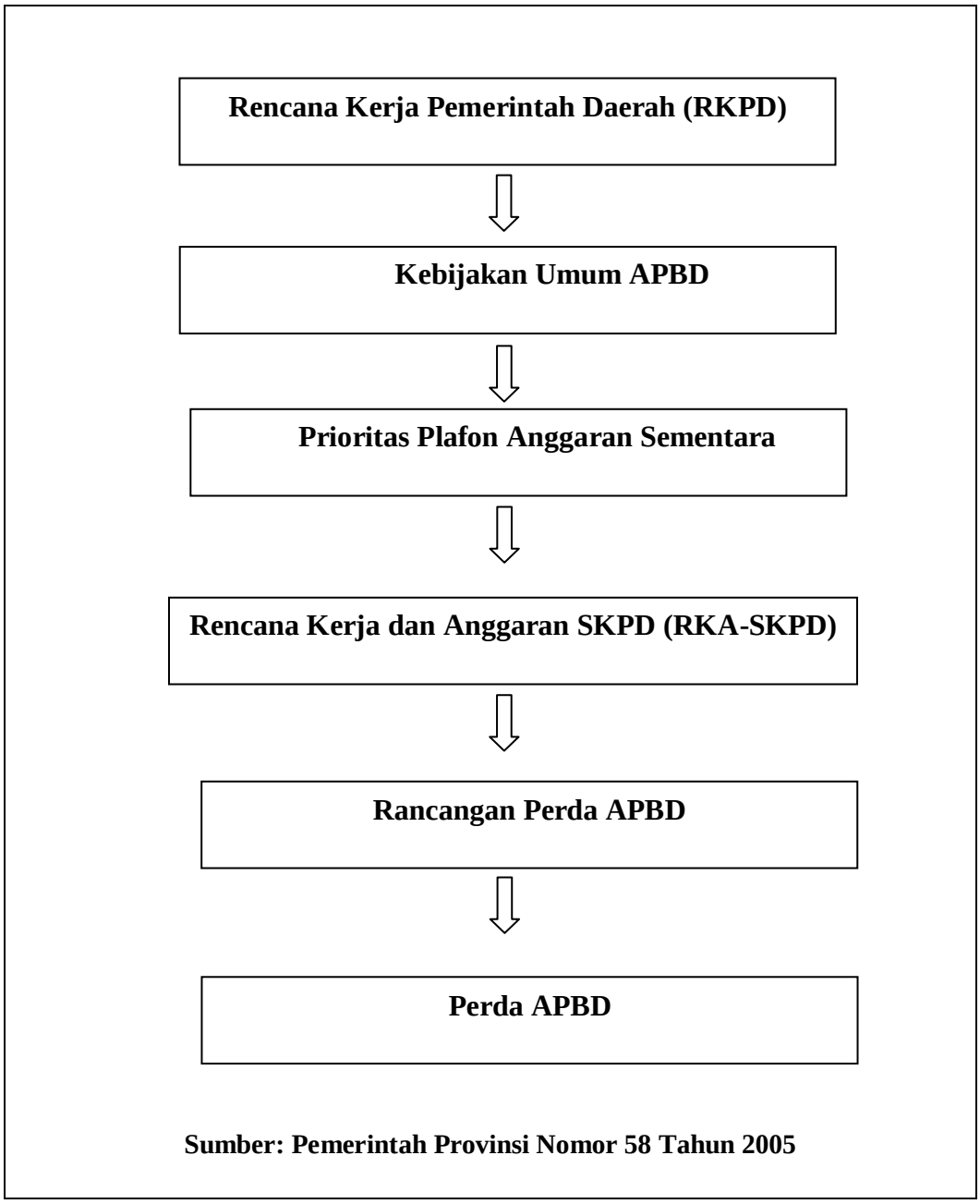
Sumber : Pemerintahan Provinsi Jawa Barat 2010

Gambar 1.1

Siklus Anggaran

Proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut: (1) penyusunan rencana kerja pemerintah daerah; (2) penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran; (3) penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara; (4) penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; (5) penyusunan rancangan perda APBD; dan (6) penetapan APBD.

Dalam gambar, tahapan penyusunan rancangan APBD terlihat sebagai berikut:



Sumber: Pemerintah Provinsi Nomor 58 Tahun 2005

Gambar 1.2

Tahapan Penyusunan Rancangan APBD

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menaungi beberapa instansi yang salah satunya adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Dinas Sosial mengadakan kegiatan belanja langsung operasi yang harus dibuat pelaporan realisasi anggarannya setiap semesternya. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari instansi pemerintah provinsi yang memberi manfaat jangka pendek. Sehingga belanja dapat diklasifikasi menjadi beberapa jenis diantaranya belanja operasi dan belanja modal.



Sumber : Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah. 2009

Gambar 1.3

Klasifikasi Belanja

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan dicatat dalam sebuah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Data tersebut diantaranya adalah belanja langsung operasi, semua data tersebut di input pada Pemerintahan Jawa Barat khususnya pada bagian akuntansi dan pelaporan untuk dibuatkan laporan realisasi anggaran yang akhirnya akan dipertanggungjawabkan pada pemerintah pusat agar dapat dibuatkan kembali perencanaan kegiatan.

Laporan realisasi anggaran dibuat agar Pemerintah mengetahui seberapa besar penyerapan dana yang sudah dicairkan untuk kegiatan dan dari laporan realisasi anggaran akan diketahui surplus atau defisit yang didapat dalam kegiatan tersebut. Diketahuinya surplus atau defisitnya APBD suatu data dari laporan realisasi anggaran tersebut pun sudah diatur dalam undang-undang, salah satunya dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 56 dan pasal 57 tentang perbedaan antara surplus dan defisit suatu dana yang sudah dikeluarkan dan tertuang dalam laporan realisasi anggaran.

Dalam pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran ini, pegawai instansi memerlukan kelengkapan data pembelanjaan langsung operasi. Dengan kelengkapan data inilah, pegawai instansi yag sudah bertanggung jawab dalam penyusunan laporan realisasi anggaran akan menjalankan penyusunan dengan baik dan lancar agar tercapai sasaran yang ditentukan dan pelaporan realisasi anggaran ini dilaksanakan setiap semester secara manual serta pembuatannya pun berkesinambungan.

Fenomena yang terjadi pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berhubungan dengan Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan realisasi anggaran dibuatkan sebagai salah satu cara untuk mengevaluasi dan mengendalian pembelanjaan langsung operasi yang terjadi pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk digunakan kepada masyarakat. Selama ini kapabilitas dan efektivitas dalam perencanaan dan pengendalian keuangan dirasakan masih terlalu lemah. Pemborosan adalah fenomena umum yang terjadi di berbagai departemen pemerintah, sehingga dapat menyebabkan banyak layanan publik dijalankan tidak secara efisien dan kurang sesuai dengan kebutuhan publik, sementara dana pada anggaran yang pada dasarnya merupakan dana publik habis dibelanjakan. Oleh demikian untuk memenuhi pelayanan Pemerintah kepada publik akan terpenuhi, maka Pemerintah membuatkan Laporan Realisasi Anggaran untuk diketahui berapa dana yang akan dianggarkan dan berapa yang akan direalisasikan, untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan menulis masalah tersebut ke dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul :

“Tinjauan Atas Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

a. Tidak tepatnya prosedur penyusunan anggaran sehingga menyebabkan terjadinya pemborosan dalam pelaksanaan anggaran.
b. Terjadinya pemborosan pada pelaksanaan anggaran, menyebabkan tidak terciptanya efektivitas dalam pelaksanaan anggaran.

1.2.2 Rumusan Masalah

a. Bagaimana Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
b. Bagaimana gambaran tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai Tinjauan Atas Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam Tugas Akhir dan untuk memahami Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat serta mencari dasar teoritis yang didapat didalam perkulihan dengan kenyataan sebenarnya.

Adapun tujuan dari penelitian pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
b. Untuk mengetahui bagaimana gambaran perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan akademis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan terutama yang berkaitan dengan penyusunan laporan realisasi anggaran pada Pemerintah provinsi Jawa Barat.

b. Kegunaan bagi peneliti lain

Dapat menambah pengetahuan umum tentang penyusunan laporan realisasi anggaran perusahaan dan dapat menjadi referensi khususnya bagi pihak yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah bahasan dalam penelitian ini.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian yang penulis lakukan diharuskan memperoleh beberapa hasil yang sekiranya yang dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktik sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Yaitu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis terutama yang berkaitan dengan Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

b. Bagi Perusahaan

Diharapkan laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menganalisa masalah

yang timbul terhadap Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

c. Bagi Peneliti Lain

Dapat memberikan pengetahuan dan dapat menjadi referensi yang memberikan masukan dalam pengembangan masalah dan solusi dibidang kajian yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas dalam penelitian ini, bagi peneliti selanjutnya maupun bagi pihak yang berkepentingan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis melakukan penelitian pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang berada di Jalan Diponegoro No.22 Bandung 40115. Tlp. (022) 4232448.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini di mulai pada bulan Maret s/d Juni 2011.

Untuk keterangan lebih lanjut lihat tabel 1.1 sebagai berikut: